

*Surat Kabar Harian "SUARA KARYA", terbit di
Jakarta, Edisi 9 Januari 1999*

SEKOLAH DI LUAR NEGERI, HARUSKAH DILARANG?

Oleh : Ki Supriyoko

Meskipun pintu pendidikan tahun 1998 baru saja ditutup, bukan berarti segala permasalahan pendidikan di tahun 1998 telah terselesaikan. Ternyata masih banyak permasalahan pendidikan yang sampai kini belum mendapat penyelesaian dan kepastian yang jelas; salah satu di antaranya adalah soal pemikiran pelarangan anak-anak Indonesia untuk belajar di luar negeri.

Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu Presiden B.J. Habibie telah meminta pada Pak Juwono Sudarsono selaku menteri pendidikan beserta segenap jajarannya untuk mengkaji kemungkinan dilarangnya anak-anak Indonesia untuk belajar di luar negeri di tingkat TK, SD, SMU dan SMK. Ada dua pertimbangan tentang pemikiran pelarangan ini; yang pertama menyangkut pertimbangan ekonomi dan yang kedua menyangkut pertimbangan sosial budaya. Secara ekonomik "larinya" anak-anak Indonesia ke luar negeri itu sama dengan membawa uang kita ke luar negeri, sementara itu secara sosial budaya dikhawatirkan anak-anak yang sejak dini belajar di luar negeri dapat kehilangan jati dirinya sebagai anak Indonesia.

Pelarangan tersebut, kalau kemungkinannya ada, tentu tidak akan diberlakukan bagi anak-anak staf diplomatik dan/atau anak-anak yang orang tuanya memang menetap di luar negeri baik secara permanen maupun semipermanen.

Pemikiran yang sempat menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan civitas pendidikan maupun di kalangan orang tua tersebut, sampai kini belum ada kepastian yang jelas. Masyarakat kita belum mengetahui kebijakan akhir yang diambil pemerintah kita; apakah pelarangan itu benar-benar diberlakukan, atau tidak ada pelarangan sama sekali sebagaimana dengan kebijakan yang sudah-sudah, apakah sebelum ada pelarangan dimulai dengan himbauan, atau pemikiran tersebut dibiarkan mengambang sampai orang melupakannya.

Dua Pertimbangan

Pemikiran tersebut sekilas terkesan cukup mengada-ada; bahkan terkesan kontradiktif dengan hak azasi anak untuk mendapatkan pelajaran pendidikan yang

lebih baik. Hal ini tentu tidak salah; namun demikian marilah kita coba memahami latar belakang dimunculkannya pemikiran tersebut di atas.

Semenjak dulu memang sudah banyak anak-anak Indonesia yang belajar di luar negeri. Pengalaman kami melihat anak-anak Indonesia yang belajar pada beberapa sekolah terbaik di Australia, antara lain di Methodis Ladies College, Billanook School, dan juga Trinity College, menemukan adanya "ikatan" yang membuat anak-anak kita kerasan di sekolah tersebut. "Ikatan" ini berupa kebanggaan atas mutu sekolah serta peran anak dalam aktivitas ekstra kelas. Anak-anak kita umum-nya bangga dengan mutu sekolah yang memang *oke*; dan yang kedua mereka merasa diperankan (*diuwongke*) dalam aktivitas ekstra kelas, misalnya melatih tari khas Indonesia. Dua hal itulah yang "mengikat" anak-anak kita belajar di luar negeri.

Dan, ternyata hal tersebut juga berlaku bagi anak-anak Indonesia yang belajar di negara-negara nonAustralia; misalnya di Jepang, AS, Jerman, Inggris, Belanda, dan sebagainya.

Banyaknya anak-anak Indonesia yang belajar ke luar negeri kian hari memang kian banyak. Bahkan, akhir-akhir ini terdapat arus kuat yang menghanyutkan anak-anak kita untuk belajar di Australia. Kira-nya harus kita akui bahwa sistem promosi pendidikan Australia yang berhasil di satu sisi dan terbatasnya lembaga pendidikan bermutu di Indonesia pada sisi yang lain telah menyebabkan banyaknya orang tua yang memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di negeri Kangguru.

Menurut data yang dikeluarkan oleh *Departement of Education, Employment and Training (DEET)* Australia, sekarang diperkirakan ada sekitar 15 ribu siswa asing di Australia yang berasal dari Indonesia (tidak termasuk dari negara lain). Mereka ini mengambil studi dari berbagai tingkatan, SD sampai PT, dan mengambil studi dari berbagai jenis, baik yang berjangka pendek seperti kursus dan training maupun yang berjangka panjang seperti program formal di SMU dan PT.

Pada sisi yang lain biaya studi di Australia, meski secara relatif lebih murah daripada AS, Canada, Jerman dan Inggris, tetapi secara absolut cukup tinggi untuk ukuran "kantong" Indonesia. Sebagai ilus-trasi sekarang saya sedang mengirim dosen untuk mengambil program S3 di RMIT Australia selama tiga tahun; dan kami harus membayar sebesar 115 ribu dolar Australia. Itu berarti tiap tahunnya kami harus membayar 35 s/d 40 ribu dolar Australia.

Nah, sekarang kalau dari yang 15 ribu anak-anak Indonesia yang sedang mengambil studi di Australia tersebut rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 20 ribu dolar saja per anak per tahun maka setiap tahun kita harus menyetor 300 juta dolar ke Australia. Kalau satu dolarnya (AusD) sekarang ini bernilai 5 ribu rupiah maka secara kolektif setiap tahunnya kita harus "membuang" uang sekitar 1,5 trilyun rupiah. Itu baru untuk Australia saja; belum termasuk uang yang harus "dibuang" ke AS, Jerman, Inggris, Canada, Jepang, Singapura, beserta negara-negara tujuan pendidikan yang lainnya. Sudah barang tentu jumlah keseluruhan uang itu menjadi tidak kecil nilainya kalau dibandingkan dengan anggaran pendidikan dalam RAPBN

Dalam keadaan krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan dan belum sepenuhnya pulih sampai sekarang ini maka dana tersebut tentu lebih besar lagi nilainya.

Apabila saat ini kita "memegang" uang sebesar 1,5 trilyun rupiah kita dapat memberikan dana peningkatan gizi untuk seluruh siswa SD di Indonesia, yang jumlah keseluruhannya sekitar 30 juta anak, selama 100 hari berturut-turut, atau selama hampir satu catur wulan; dengan satuan 500 rupiah per anak per hari. Pengapabilaan ini wajar-wajar saja karena dalam realitasnya sekarang ini banyak anak-anak sekolah kita yang mengalami gangguan belajar dikarenakan mengalami kekurangan gizi.

Dari ilustrasi tersebut maka secara ekonomik tentunya kita dapat memaklumi munculnya pemikiran untuk mengadakan pelarangan studi di luar negeri bagi anak-anak Indonesia; meskipun arti permakluman ini tidak secara otomatis menjadi persetujuan.

Jangan Pelarangan

Bagaimana dengan pertimbangan sosial budaya? Tentang hal ini memang masih diperlukan diskusi panjang. Di satu sisi anak-anak usia praperguruan tinggi memang masih amat labil; dari dimensi psikologis mereka sedang mengalami masa-masa "kompromistis", sehingga nilai-nilai apa saja, baik maupun buruk, yang dekat dengan dirinya sangat mudah untuk diterima dan diakomodasi. Meskipun demikian kita juga harus jujur mengakui bahwa tidak semua nilai-nilai yang berkembang di negara maju itu buruk; bahkan dalam beberapa hal justru lebih baik dan konstruktif daripada yang berkembang di Indonesia, misalnya soal disiplin, sportivitas, praktikabilitas, dan sebagainya.

Jadi, apabila dia siap menerima nilai-nilai yang lebih konstruktif meskipun di luar negeri mengapa dia harus dilarang untuk bersekolah di luar negeri? Bukankah nilai-nilai yang konstruktif tersebut justru dapat dikembangkan di Indonesia setelah mereka "pulang kampung". Bahwa di samping nilai-nilai konstruktif anak tersebut juga membawa nilai yang destruktif kiranya tidak dapat dihindarkan; namun demikian apakah nilai destruktif yang dibawa senantiasa lebih banyak daripada yang konstruktif.

Dari berbagai ilustrasi tersebut kiranya terminologi pelarangan tidak tepat dipakai dalam kasus anak-anak Indonesia yang akan belajar di luar negeri; bila sifatnya anjuran atau himbauan untuk tidak keburu belajar di luar negeri sebelum mencapai tingkatan perguruan tinggi kiranya lebih dapat diterima masyarakat. Itu pun perlu disertai argu-mentasi dan bukti-bukti yang memadai.

Bagaimana dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Sudah barang tentu hal ini perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Jangan sampai hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas

Itu berarti kalau pemerintah akan mengeluarkan anjuran ataupun himbauan agar orang tua tidak menyekolahkan anaknya di luar negeri sebelum mencapai jenjang perguruan tinggi maka pemerintah haruslah konsekuen menyediakan sekolah-sekolah yang benar-benar bermutu di dalam negeri.

Di samping menyediakan sekolah bermutu, juga sekolah-sekolah yang aktivitas ekstrasnya benar-benar diminati oleh siswa sebagaimana anak-anak kita meminati aktivitas ekstra di MLC, Billanook School, atau sekolah-sekolah lain di luar negeri pada umumnya. Mampukah pemerintah kita dalam waktu dekat ini menyediakan sekolah-sekolah yang di samping bermutu juga memiliki aktivitas ekstra yang diminati siswa?

Menurut perhitungan: tidak, tidak mampu !!!*****

BIODATA SINGKAT;

*: *DR. Ki Supriyoko, M.Pd.*

*: *Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), serta
Director of Pan-Pacific Association of Private Education
(PAPE) yang bermarkas di Tokyo, Jepang*